

## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald, R., dan Pamela S, Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi ke 12, International Edition, New York: McGraw-Hill Education.
- Diana Anastasia., dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, Andie., Mochammad Djudi Mukzam dan Devi Farah Azizah, 2014, “Analisis Penerapan Mekanisme Penomoran Faktur Pajak sebagai Upaya Peningkatan PPN”, *Student Journal UB*, Diakses 30 Januari 2016, <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/download/44/3>
- Republik Indonesia, 2007, *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Tahun 2007, No. 85, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang-undang No, 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Lembaran Negara Tahun 2009, No. 150, Sekretariat Kabinet, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2010, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 132/PJ/2010 Tentang Langkah-langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 525, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1521, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.





Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 33/PJ/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 10/PJ/2010 Tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 950, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Sari, Selfi Ayu Permata., dan Devi Pusposari, 2015, “Penerapan e-Faktur sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)”, *Student Journal UB*, Diakses 30 Januari 2016, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/2360/2149>.

Sukardji, Untung (2015), *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015), *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Ari dan Putu Agung Widyadnyana, *e-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat*, [www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68](http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=68), Diakses 15 September 2015.